

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

IV.1. Sejarah Kabupaten Bima

Bukti-bukti sejarah kepurbakalaan yang ditemukan di Kabupaten Bima seperti Wadu Pa'a, Wadu Nocu, Wadu Tunti (batu bertulis) di dusun Padende Kecamatan Donggo menunjukkan bahwa daerah ini sudah lama dihuni manusia. Kabupaten Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 M, ketika Sultan Abdul Kahir dinobatkan sebagai Sultan Bima I yang menjalankan Pemerintahan berdasarkan Syariat Islam. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Bima yang diperingati setiap tahun (Haris, 2006).

Sejak mendapat pengaruh Islam pada awal abad ke XVI tersebut maka pada masa itu susunan dan penyelenggaraan pemerintahan disesuaikan dengan tata pemerintahan Kerajaan Gowa yang tidak hanya melakukan ekspansi politik namun juga memberi pengaruh besar terhadap masuknya agama Islam (islamisasi) di Bima (Madjid, 2008). Gelar Ncuhi diganti menjadi Galarang (Kepala Desa) (Bimakab.go.id). Demikian Hamzah (2017), menjelaskan bahwa struktur Pemerintahan Bima juga diganti berdasarkan Majelis Hadat yang terdiri atas unsur Hadat, unsur Sara dan Majelis Hukum yang mengemban tugas pelaksanaan hukum Islam. Menurut Sulisty (2014), juga menjelaskan dalam

desertasinya bahwa majelis hadat beranggotakan 24 orang dengan gelar, Toreli, jeneli (Qadhi), dan Bumi.

1. Majelis Toreli (Dewan Menteri) yang terdiri dari Toreli Bolo, Woha, Belo, Sakuru, Parado dan Toreli Donggo yang dipimpin oleh Toreli Nggampo/ Raja Bicara (Haris, 2006).
2. Majelis Hadat yang dikepalai oleh Kepala Hadat yang bergelar Bumi Lumah Rasa Na'E dibantu oleh Bumi Lumah Bolo. Majelis Hadat ini beranggotakan 12 orang dan merupakan wakil rakyat yang menggantikan hak Ncuhi untuk mengangkat/ melantik atau memberhentikan Sultan.
3. Majelis Agama dikepalai oleh seorang Qadhi (Imam Kerajaan) yang beranggotakan 4 orang Khotib Pusat yang dibantu oleh 17 orang Lebe Na'E.

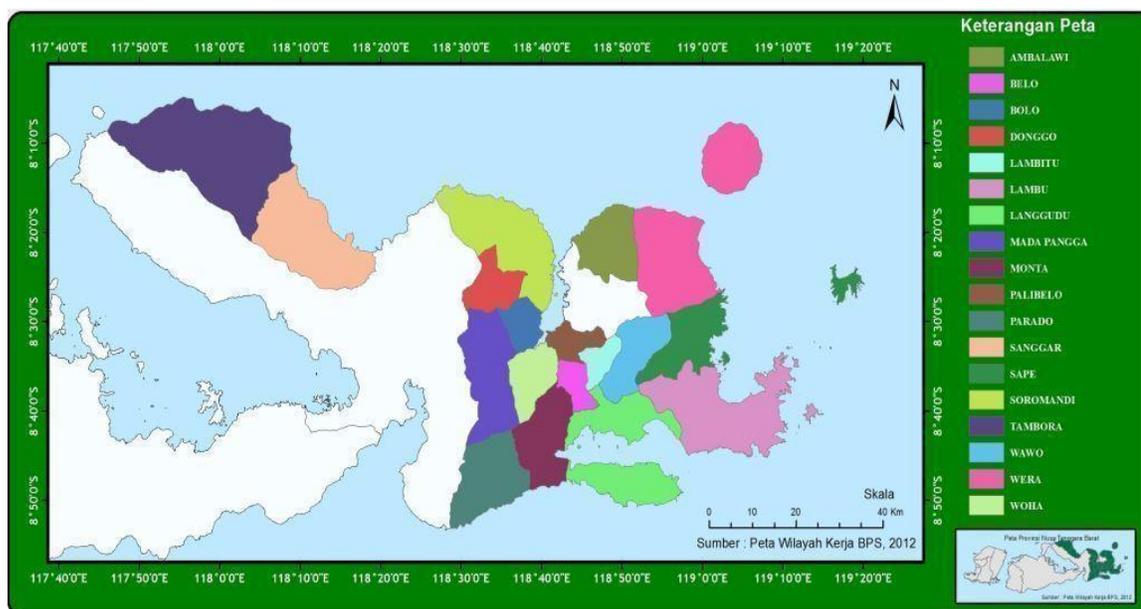
Penduduk yang mendiami Daerah Kabupaten Bima, mereka yang menyebut dirinya Dou Mbojo (Warsita, 2010). Sedangkan masyarakat Bima yang tinggal dikawasan pegunungan tersebut disebut Dou Donggo (orang gunung) (Hidayatullah, 2008). Disamping penduduk asli, juga terdapat penduduk pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa, Madura, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Maluku (Hermanto, 2016).

Seiring dengan perjalanan waktu, Kabupaten Bima juga mengalami perkembangan kearah yang lebih maju. Dengan adanya kewenangan otonomi

yang luas dan tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bingkai otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten Bima telah memanfaatkan kewenangan itu dengan terus menggali potensi-potensi daerah baik potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pertumbuhan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Salahudin, 2012).

Untuk memenuhi tuntutan dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat, Kabupaten Bima telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah mulai tingkat dusun, desa, kecamatan, dan bahkan dimekarkan menjadi Kota Bima pada tahun 2001 (Sabaruddin, 2008). Hal ini dilakukan tidak hanya untuk memenuhi tuntutan untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat yang terus berkembang dari tahun ke tahun tetapi juga karena adanya daya dukung wilayah (Harmantyo, 2011).

Kabuapten Bima sebelum otonomi daerah hanya terdiri dari 10 kecamatan, kemudian setelah otonomi daerah kecamatan sebagai pusat ibukota Kabupaten Bima dimekarkan menjadi Kota Bima, dan Kabupaten Bima memekarkan beberapa wilayah kecamatannya menjadi 14 kecamatan dan pada tahun 2006 dimekarkan lagi menjadi 18 kecamatan dengan pusat ibukota kabupaten Bima yang baru dipusatkan di Kecamatan Woha (Bimakab.go.id).



Gambar 4.1 Wilayah Kabupaten Bima

Agar diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai tata kelola bersama (*Collaborative Management*) wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk memaparkan terlebih dahulu tentang Wilayah kabupaten Bima.

IV.2. Data Monografi Kabupaten Bima

a. Kondisi Geografi

Menurut Satriani, dkk (2016) berdasarkan teritorial wilayah Kabupaten Bima terletak di ujung timur Propinsi Nusa Tenggara Barat yang bersebelahan dengan Kota Bima pemekaran dari Kabupaten Bima). Luas wilayah mencapai 4.389,400 km². Terletak diantara: 117°.40' — 119°.24' BT dan 700.30' LS, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Flores

Sebelah Timur : Selat Sape

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Dompu

b. Keadaan Topografi

Secara topografis wilayah kabupaten Bima sebagian besar (70%) merupakan dataran tinggi bertekstur pegunungan sementara sisanya (30%) adalah dataran rendah. Sekitar 14% dari proporsi dataran rendah tersebut merupakan areal persawahan dan lebih dari separuh merupakan lahan kering.

Dilihat dari ketinggian dari permukaan laut, Kecamatan Donggo merupakan daerah tertinggi dengan ketinggian 500 m dari permukaan laut, sedangkan daerah yang terendah adalah Kecamatan Sape dan Sanggar yang mencapai ketinggian hanya 5 m dari permukaan laut.

Wilayah Kabupaten Bima dikelilingi oleh pegunungan yang terdiri dari gunung Tambora di Kecamatan Tambora, gunung Sangiang di Kecamatan Wera, Gunung Maria di kecamatan Wawo, dan gunung Soromandi di kecamatan donggo, dan Gunung Soromandi merupakan gunung yang tertinggi di kabupaten Bima dengan ketinggian mencapai 477.5 m.

Kabupaten Bima juga terdiri atas 315,96 Km² atau 7,22 persen lahan sawah dan 4.058,69 Km² atau 92,78 persen lahan bukan sawah. Luas lahan sawah ini meningkat sebanyak 8,53 km² jika dibandingkan tahun 2008 yang luasnya 307,43 Km². Peningkatan luas areal sawah ini didorong oleh semakin berkurangnya luas hutan, baik itu hutan negara maupun luas hutan rakyat.

Tabel 4. 1 : Luas dan Tinggi Kota Kecamatan dari Permukaan Laut di Kabupaten Bima

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH		IBU KOTA	KETINGGIAN DI ATAS PERMUKAAN LAUT (m)
		(Ha)	(KM ²)		
1	Monta	22.743	227.430	Tangga	
2	Parado	26.129	261.290	Parado	
3	Madapangga	23.758	237.580	Dena	20
4	Woha	37.557	375.570	Tente	10
5	Belo	4.476	44.760	Cenggu	
6	Langgudu	32.294	322.940	Karumbu	50
7	Wawo	24.129	241.290	Maria	
8	Sape	23.212	232.120	Naru	5
9	Lambu	40.425	404.250	Lambu	
10	Wera	46.532	465.320	Tawali	35
11	Ambalawi	18.065	180.650	Nipa	6
12	Donggo	13.041	130.410	O'o	
13	Sanggar	47.789	477.890	Kore	5
14	Tambora	62.782	627.820	Labuan Kananga	6
15	Bolo	6.293	62.930	Sila	10
16	Soromandi	33.508	335.080	Samoungu	
17	Lambitu	6.540	65.400	Teta	
18	Palibelo	7.158	71.580	Teke	
	Total	438.940	4.389.400		

Sumber Data : BPN Kab. Bima tahun 2013

Tabel 4.2 : Penggunaan Lahan di Kabupaten Bima

NO	JENIS PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (Ha)	%
1	Lahan Sawah a. Sawah Irigasi Teknis	-	-
	b. Sawah Irigasi Setengah Teknis	14.161	2.97
	c. Sawah Irigasi Sederhana P.U	1.671	0.35
	d. Sawah Irigasi Sederhana Non P.U	7.047	1.48
	e. Sawah Tadah Hujan	5.053	1.06
	f. Sawah Pasang Surut	-	-
	Luas Tanah Sawah	27.937	5.86
2	Lahan Bukan Sawah a. Tanah Bangunan dan Pekarangan	3.548	0.74
	b. Tegal/Kebun	38.267	8.03
	c. Ladang/Huma	6.464	1.36
	d. Padang/Rumput Pengembalaan	15.589	3.27
	e. Tanaman Kayu-Kayuan/Hutan Rakyat	43.088	9.04
	f. Hutan Negara	247.985	52.05
	g. Tanah Sementara Tidak Usahakan	23.033	4.83
	h. Perkebunan	9.930	2.08
	i. Tambak	2.769	0.58
	j. Kolam/Tebat/Empang	38.372	8.05
	k. Rawa-rawa yang tidak ditanami	287	0.06
	l. Lain-lain	19.162	4.02
	Luas Bukan Sawah	448.494	94.14
Luas Total	438.940	100	

Data BPN Kab. Bima tahun 2014

Di antara 18 kecamatan di Kabupaten Bima, Kecamatan Sanggar dan Tambora memiliki wilayah yang paling luas, masing-masing 16,46 persen dan 11,54 persen dari luas wilayah kabupaten. Dari sisi jarak ke pusat pemerintahan Kabupaten, Kecamatan Sanggar dan Tambora merupakan kecamatan yang berlokasi terjauh, dimana jarak masing-masing sekitar 130 km dan 250 km.

Kabupaten Bima juga memiliki lahan dengan tingkat kemiringan terdiri dari 0-2%, 3-15%, 16-40%, dan lebih besar dari 40%. Tingkat kemiringan lebih besar sama dengan 16% mencapai lebih dari 50% dari luas wilayahnya, hal ini terjadi terutama di Kecamatan Wawo, Sanggar, Monta dan Donggo.

c. Keadaan Iklim

Dari aspek iklim, berdasarkan data Data Pusat Statistik Kabupaten Bima 2015, keadaan curah hujan tahunan rata-rata tercatat 58.75 mm, dengan demikian Kabupaten Bima adalah daerah berkategori kering sepanjang tahun, yang berdampak pada kecilnya persediaan air dan keringnya sebagian besar sungai. Curah hujan tertinggi pada bulan Januari tercatat 299 mm dengan hari hujan selama 25 hari dan musim kering terutama pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September hingga Oktober dimana tidak terjadi hujan. Kabupaten Bima pada umumnya memiliki drainase yang tergenang dan tidak tergenang. Pengaruh pasang surut hanya seluas 1.085 Ha atau 0,02% dengan lokasi terbesar di wilayah pesisir pantai. Sedangkan luas lokasi yang tergenang terus menerus adalah seluas 90 Ha yaitu wilayah Dam Roka dan Dam Sumi. Sedangkan Wilayah yang tidak pernah tergenang di Kabupaten Bima adalah seluas 458.093 Ha.

d. Keadaan Geologi

Wilayah Kabupaten Bima dijumpai jenis tanah alluvial, komplit regosol, komplit litosol dan komplit mediteran. Masing-masing jenis tanah tersebut

tersebar hampir diseluruh wilayah Kabupaten Bima. Adapun jenis tanah yang dominan adalah jenis tanah kompleks mediteran seluas 154,111 Ha, Sedangkan jenis tanah yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Bima adalah kompleks Litosol dan Mediteran cokelat. Kedalaman efektif tanah (solurn) untuk seluruh jenis tanah yang dijumpai dapat dikelompokkan atas kelas kedalaman lebih dan 90 cm, 60-90 cm, 30-60 cm dan 30 cm.

Tingkat erosi yang ten-jadi pada wilayah Kabupaten Bima relatif tinggi dan luas. Wilayah yang telah mengalami erosi menjadi 419.889 Ha atau 91,3% dan luas wilayah dengan tingkat erosi sedikit, sedang, sampai berat. Erosi tanah dipengaruhi oleh curah hujan, kemiringan lahan, tekstur tanah, kandungan bahan organik, serta vegetasi penutup lahan.

e. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2014, bahwa Kabupaten Bima memiliki jumlah penduduk sebanyak 463.419 Jiwa yang terdiri dari 230.649 (49,88%) Jiwa berjenis kelamin laki-laki, dan 232.770 (50,12%) berjenis kelamin perempuan yang tersebar di 18 Kecamatan.

Kemudian berdasarkan kepadatan wilayah dimana Kecamatan yang terpadat penduduknya yaitu Kecamatan Belo yakni (516 Jiwa/Km²). Dan diikuti oleh Kecamatan Parado yakni (317 Jiwa/Km²). Sedangkan wilayah Kecamatan yang tergantung kepadatan penduduk yakni Kecamatan Soromandi (91 Jiwa/Km²) kemudian diikuti oleh wilayah Kecamatan Sanggar yakni (24

Jiwa/Km²) dengan demikian, rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bima yakni (99 Jiwa/Km²).

Kemudian wilayah Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yakni Kecamatan Sape sejumlah 56.572 Jiwa kemudian diikuti oleh Kecamatan Bolo sejumlah 47.175 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Tambora sejumlah 7.071 jiwa, dan Kecamatan Lambitu sejumlah 5.433 jiwa.

f. Potensi Ekonomi

1) Sektor Industri Pengolahan, Kerajinan dan Pertambangan

Sektor ini masih kurang hubungannya dengan sektor pertanian, karena hasil yang diproduksi dari sektor pertanian sebagian besar langsung dijual tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Hanya sebagian kecil hasil produksi yang sudah diolah. Berkaitan dengan hal itu, penyerapan tenaga kerja dari sektor ini hanya mencapai 4,54%. Angka ini memperlihatkan bahwa aktivitas masyarakat dalam pengolahan hasil masih kurang.

2) Industri Pengolahan dan Kerajinan

Pada tahun 2011 terdapat 4.585 unit yang bergerak pada bidang industri yang terdiri dari sentra pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan,

pengolahan hasil peternakan dan kerajinan. pada sentra pengolahan hasil pertanian kegiatan utama yang dilakukan adalah pembuatan sambal jeruk, kue kering, dodol ketan, dodol nangka, keripik pisang, keripik singkong, tape singkong, tahu, tempe, minyak kelapa, bawang goreng dan pengolahan rumput laut. Pada sentra pengolahan hasil perikanan kegiatan yang dilakukan yakni pembuatan kerupuk ikan, kerupuk udang, ikan pindang, abon ikan, pengasinan ikan, pengeringan ikan dan bandeng presto.

3) Industri Pertambangan

Sektor industri pertambangan di Kabupaten Bima sampai dengan dewasa ini belum cukup berkembang, karena untuk mengelola pertambangan membutuhkan tenaga kerja yang ahli dan terampil serta membutuhkan investasi yang besar. Namun demikian, untuk bahan tambang/penggalian seperti tanah, batu, pasir, kapur dan lainnya telah berjalan dengan cukup baik seperti industri batu bata, genteng, gerabah, penggalian batu dan pasir bahan bangunan dan pembuatan kapur bangunan.

Sumber daya tambang dan mineral baik Golongan B maupun Golongan C di Kabupaten Bima cukup besar namun belum dikelola dengan baik. Misalnya Marmer yang memiliki potensi yang besar, batu gamping, dan bahan galian Golongan C lainnya. Sumber daya tambang Golongan B seperti emas, bijih besi, dan lainnya, belum sama sekali dikelola, karena membutuhkan peralatan dan investasi yang besar.

4) Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat berperan dalam mendorong perkembangan perekonomian. Sektor ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua sektor terutama sektor pertanian, industri pengolahan dan kerajinan, dan industri pertambangan, karena merupakan bagian yang memproses pemasaran dari hasil-hasil yang diproduksi sektor-sektor tersebut. Penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan pada tahun 2011 mencapai 15,75 %. Angka ini termasuk sebagian besar dari usaha-usaha kecil yang masih dominan di Kabupaten Bima (Bimakab.go.id).

g. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Bima memiliki potensi alam yang luar biasa, baik di darat maupun di laut. Di darat terdapat kandungan tambang berupa marmer, pasir besi, emas, mangan dan gamping. Di samping itu, terdapat lahan pertanian yang cukup luas, baik lahan ber irigasi maupun ladang yang cocok untuk perkebunan tanaman tahunan dan keras. Di laut memiliki berbagai macam biota laut seperti ikan yang sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Dengan penduduk sebanyak 463.419 jiwa, sesungguhnya potensi alam yang merupakan *god's endowment* sangatlah mustahil masyarakat mengalami kesulitan meningkatkan pendapatan dan terjat dalam perangkap kemiskinan. Kondisi ideal yang diharapkan dari persebaran penduduk antar wilayah adalah adanya penyebaran penduduk yang merata. Hal ini lebih menjamin kelancaran pelaksanaan

pembangunan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menjamin perekonomian suatu wilayah. Secara garis besar potensi beberapa sektor di Kabupaten Bima adalah :

1. Sektor pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang masih dominan dalam sektor-sektor ekonomi, karena sektor ini memberikan kontribusi hampir separuh (48,94%) dari PDRB. Sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja yang besar yaitu mencapai 57,67%. Sektor pertanian meliputi: tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Sektor pertanian merupakan dasar kemajuan ekonomi, karena pada sektor ini banyak menyediakan komoditi - komoditi yang dapat di olah menjadi barang-barang yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Tanaman hortikultural dapat dilihat bahwa pemanfaatan lahan belum maksimal seperti pada tanaman bawang merah, mangga, nangka, dan lain-lain. Walaupun bawang merah merupakan komoditi yang terbesar dan komoditi andalan karena sudah cukup berhasil dan menjadi komoditi ekspor ke luar daerah dan biasanya ditanam setelah tanaman padi.

2. Perkebunan

Pada sub sektor perkebunan, Kabupaten Bima memiliki beberapa komoditi unggulan, diantaranya jambu mente, kelapa, kemiri, asam, wijen, dan kopi. Dalam kurun waktu 2011, komoditi jambu mete mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan 654,44 ton. Peningkatan produksi ini terjadi

karena perluasan areal tanam serta nilai jualnya yang semakin tinggi dibandingkan dengan jenis komoditi perkebunan lainnya. Khusus untuk tanaman kopi yang berada di kawasan Tambora produksi mencapai 802,98 ton, selama ini pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

3. Kehutanan

Dari luas Kabupaten Bima 4.389,40 Ha, sebagian besar terdiri dari dataran tinggi dan hutan. Luas hutan negara sebesar 54,36 % dan 9,25% hutan rakyat. Sebagian besar dari hutan yang ada di Kabupaten Bima, telah rusak akibat dari eksploitasi hutan yang tidak sesuai seperti; perladangan liar, pencurian kayu dan pengusahaan hutan yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undang dan kelestarian hutan.

Kawasan hutan di Kabupaten Bima seluas 269.713 Ha, terdiri dari hutan lindung seluas 83.189,91 Ha, hutan konservasi seluas 69.871,41 Ha, hutan produksi terbatas seluas 73.532,91 Ha, hutan produksi seluas 116.646,20, dan HPK/IPK seluas 6.800 Ha. Disamping produksi berbagai jenis kayu, terdapat juga produk hasil hutan ikutan non kayu seperti madu, kemiri, rotan, dan bambu.

Perkembangan produksi hasil hutan berupa kayu mengalami peningkatan produksi yang cukup tinggi pada tahun 2008 mencapai 53.641,29 m³ namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan produksi seperti pada tahun 2011 hanya 3.971,2 m³.

4. Perikanan dan Kelautan

Betapa pentingnya sektor kelautan perikanan bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi di kabupaten Bima sehingga dituangkan dalam salah satu visi-misi pemerintah kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat ialah pengidaman perikanan Yang Maju, Mandiri dan Berkesinambungan yang Mampu Menjadi Tulang Punggung Perekonomian Daerah Kabupaten Bima.

Karena dilihat dari potensi perairan pantai di Kabupaten Bima mencapai 9.455 Km², terdapat potensi ikan yang beraneka ragam baik ikan potensi ekspor maupun lokal sebesar 48.233 ton/tahun. Sumber daya potensial lainnya adalah mutiara dan rumput laut. Mutiara berpotensi sampai 0,2 ton/tahun pada lokasi di Kecamatan Langgudu, Wera, Sape dan Sanggar di mana telah ada 4 perusahaan dan banyak kelompok plasma budidaya kerang mutiara. Sedangkan rumput laut potensial yang cukup besar mencapai 2.648 ton/ tahun yang lokasi budidaya tersebar pada beberapa lokasi yakni Kecamatan Langgudu, Monta, Sape dan Lambu. Potensi lain yang cukup berkembang adalah pertambakan bandeng yang sentra produksinya di Kecamatan Wohu, demikian halnya dengan dan garam rakyat, lokasi produksi dan pengembangan di Kecamatan Wohu dan Bolo.

Demikian potensi perikanan baik penangkapan di laut, budidaya laut dan budidaya tambak berkembang dengan cukup baik. Dari hasil penangkapan di laut dengan potensi perairan yang luas menghasilkan kategori ikan palagis dan

ikan demersal. Ikan palagis seperti; tuna, tengiri, dan tongkol dan lain-lain cukup besar, sedangkan ikan kategori demersal seperti; kerapu, kakap, kurisi dan udang/lobster hasil tangkapan masih kurang, sementara potensinya sangat besar. Jenis ikan ini sangat potensial dan memiliki harga yang tinggi untuk di ekspor.

Budidaya laut seperti mutiara, rumput laut, dan budidaya ikan demersal belum berjalan dengan baik dan hasil yang diperoleh masih sedikit dikarenakan kegiatan budidaya masih sampingan dan masih kurang mendapat perhatian masyarakat.

Budidaya tambak ikan maupun bandeng belum berhasil dengan baik, hal ini karena pengelolaan secara tradisional, di samping hal-hal lain yang berkaitan dengan bibit dan sarana produksi lainnya yang mahal. Budidaya ini pun memiliki potensi pengembangan lahan yang cukup besar.

Salah satu komoditi yang memiliki keunggulan secara komparatif yaitu garam karena produksinya sangat berlimpah tetapi kebutuhan pasar masih relatif rendah. Luas lahan budidaya garam di Kabupaten Bima lebih kurang 869,15 Ha. Dari luas lahan tersebut, yang dapat dimanfaatkan baru sekitar 750,11 Ha, dengan produksi rata-rata 150 ton/Ha dan jumlah petani sekitar 1.160 orang. Dan dijual dalam bentuk aslinya untuk keperluan rumah tangga maupun industri, baik di pasar lokal maupun regional terutama untuk kebutuhan Indonesia Bagian Timur.

5. Sektor Pariwisata

Kabupaten Bima memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan mengingat Kabupaten Bima memiliki letak geografis yang strategis dengan wilayah perairan yang terdiri atas pantai dan lautan yang memiliki keanekaragaman hayati didalamnya , serta panorama alam yang indah.

Dikarenakan letaknya yang berada di antara tiga daerah wisata, yaitu Bali, Tanah Toraja Dan Pulau Komodo. Kabupaten Bima memiliki potensi yang dapat di manfaatkan, dalam segi akses penghubung atau perantara tiga titiik pusat pariwisata tersebut, peran penting dapat ditawarkan dengan potensi alam yang menjanjikan, seni budaya yang tinggi serta obyek pariwisata yang tidak kalah dari tiga wilayah tersebut, sehingga daerah Bima tidak hanya menjadi tempat persinggahan semata namun dapat menjadi tempat dan bagian dari tujuan pariwisata itu sendiri.

Tingkat animo masyarakat untuk menikmati keindahan alam atau sekedar meluangkan waktu luang bersama keluarga cukup tinggi, dan ini dapat di jadikan peluang ke depan untuk dapat terus dikembangkan. Tercatat bahwa tingkat kepadatan pengunjung yang tertinggi dicapai oleh wisata alam Pantai Kalaki dan Arena Pacuan kuda Panda. Ini membuktikan bahwa sudah seharusnya dan sepatutnya pengembangan pariwisata di Kabupaten Bima terus dapat dipacu. Sekarang saja usaha peningkatan dan fasilitas penunjang rekreasi pun telah mulai semakin dikembangkan, contohnya saja seperti Pantai Kalaki

yang memang memiliki potensi besar. Fasilitas yang menunjang dalam usaha memanjakan pengunjung, seperti penyewaan kano, sampan serta lingkungan yang bersih menjadi salah satu faktor pendukung yang harus terus diperhatikan. Ini juga dapat mendorong meningkatnya perekonomian pada masyarakat yang berada di sekitar lokasi pariwisata guna sekedar berinteraksi dengan pelancong menawarkan jasa atau sebagainya. Ini sudah seharusnya mulai juga dilirik oleh masyarakat sekitar yang jeli melihat peluang.

h. Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau kecil Kabupaten Bima

Wilayah pesisir dengan sumber daya alamnya memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Bima, karena kawasan pesisir merupakan kawasan sumber hayati dan non hayati yang sangat produktif meliputi biota laut tropis yang kehidupannya sangat tergantung pada ekosistem pesisir seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove dan estuari.

Namun di wilayah pesisir Kabupaten Bima juga masih terdapat sejumlah permasalahan kritis yang berkaitan dengan masalah ekologi, sosial ekonomi serta kelembagaan. Beberapa fenomena yang terjadi pada ekosistem pesisir dan pantai yang muncul dan menjadi permasalahan lingkungan di Kabupaten Bima adalah fenomena rusaknya terumbu karang, hutan mangrove, pencemaran, tangkap lebih, abrasi pantai, kerusakan gumuk pasir, penambangan pasir pantai, pelanggaran tata ruang/ sempadan pantai, serta penurunan fisik habitat pesisir lainnya.



Gambar 4.2 konversi Kawasan Hutan Mangrove menjadi tempat pengeringan Ikan

Sementara itu adanya permasalahan sosial ekonomi masyarakat di beberapa wilayah pesisir Kabupaten Bima dilihat dari adanya ketimpangan sosial ekonomi dan kemiskinan masyarakat pesisir, juga masih adanya konflik-konflik sosial antar kelompok masyarakat pesisir. Problem semacam ini sebenarnya berakar karena belum mantapnya sistem hukum serta kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir dengan baik. Dan juga belum berkembangnya kesadaran masyarakat, padahal wilayah pesisir merupakan suatu entitas yang tidak hanya memiliki makna persatuan dan pertahanan, akan tetapi mempunyai nilai ekonomi yang tinggi bagi kehidupan masyarakat apabila dikelola dengan lestari (bimakini.com).

i. Abrasi Pantai di Kabupaten Bima

Upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah sesuai tata ruang wilayah Kabupaten Bima dengan mengoptimalkan potensi strategis wilayah secara efisien, efektif, dan terintegrasi terhadap berbagai sumberdaya yang dibutuhkan untuk percepatan pembangunan wilayah dikabupaten bima. Namun pengharapan selalu menjaga kesinambungan pemanfaatan dan pelestarian SDA dan lingkungan hidup khususnya hutan dan laut. Akan tetapi karena kebutuhan dan percepatan pembangunan wilayah seringkali tidak memperhatikan daya dukung dan dampak lingkungan.

Terutama lingkungan pesisir pantai kabupaten Bima saat ini. Kabupaten Bima selalu terjadi abrasi pantai dan setiap tahun terus meningkat. Garis pantai yang semakin mendekati daratan sehingga kecendrungan penurunan luas daratan. Abrasi pantai yang terjadi hampir di sepanjang pesisir jalan menuju Kota-Bima, dan bagian utara Kecamatan Ambalawi dan Wera, Sape dan Langgudu, dan Kecamatan Parado bagian selatan.

Penyebab abrasi pantai adalah akibat penebangan pohon-pohon mangrove untuk diambil kayunya dan konversi untuk tambak garam dan lahan budidaya laut (misalnya tambak bandeng, udang dan lain-lain). Kehilangan hutan mangrove tersebut juga berpengaruh terhadap persediaan air bersih diwilayah pesisir kabupaten

Bima, dimana banyaknya pembuatan sumur-sumur bor yang berdekatan dengan pesisir seringkali terjadi intrusi air laut kedalam periaran bawah tanah.

Abrasi pantai pada beberapa lokasi disepanjang jalan yang ada di Kabupaten Bima sudah mendekati pemukiman penduduk, kawasan wisata pesisir dan fasilitas umum (jalan raya). Kondisi tersebut akan menyebabkan relokasi yang membutuhkan biaya yang besar. Dan kabupaten Bima juga menghadapi permasalahan pemanasan global (global warming). Wilayah Kabupaten Bima menjadi salah satu kawasan di Indonesia bagian timur yang terkena dampak dari pemanasan global. Pemanasan global mengakibatkan tinggi permukaan air laut (sea level rise/SLR) menjadi naik, selain juga menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan musim di daerah (Lakip BLH Kab Bima, 2014).



Gambar. 4.3 Abrasi Pantai di wilayah Pesisir Kecamatan Lambu

IV.3. Profil Instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima

Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Dalam Rencana Strategis (*RENSTRA*) Dinas *Kelautan dan Perikanan* Kabupaten Bima tahun 2016-2020, yang dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi Tahun 2016-2020, yaitu: “ *Mewujudkan Perikanan Yang Maju, Mandiri dan Berkesinambungan yang Mampu Menjadi Tulang Punggung Perekonomian Daerah Kabupaten Bima* ”.

a. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi

a) Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 26) memiliki tugas pokok sebagai berikut :

1. Merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;

3. Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.

b) Fungsi Instansi

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perikanan dan kelautan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Kewenangan

Dalam rangka pelaksanaan fungsi - fungsi sebagaimana tersebut diatas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima memiliki kewenangan yaitu melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten Bima dalam rangka pelaksanaan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan.

b. Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 serta Peraturan Bupati Bima Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bima. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima didukung oleh pejabat-pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) serta jajaran komponen pada lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima masing - masing dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah yang bertugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas. Adapun bagan struktur nomenklatur jabatan dapat dilihat pada lampiran 1.

2. Sekretariat

Merupakan unsur Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan kerumahtanggaan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b) Penyusunan rencana kerja dan program Dinas Kelautan dan Perikanan;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
- d) Pelaksanaan koordinasi tugas unit-unit organisasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan
- e) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f) Pembinaan urusan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian antara lain :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Merupakan unsur Pelaksana Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan.

2) Sub Bagian Program dan Pelaporan

Merupakan unsur Pelaksana Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

3) Sub Bagian Keuangan

Merupakan unsur Pelaksana Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan. Adapun rincian tugas Sub Bagian Keuangan antara lain :

- a. Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan usulan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas Kelautan dan Perikanan;

- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- e. Mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta menyiapkan tindak lanjut;
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Kelembagaan Usaha

Merupakan unsur Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi serta menyiapkan bahan pembinaan teknis kelembagaan usaha. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kelembagaan Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan, data dan menyiapkan bahan-bahan rumusan kebijakan dibidang kelembagaan usaha;
- b) Penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang kelembagaan usaha
- c) Pelaksanaan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi dibidang kelembagaan usaha;
- d) Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Kelembagaan Usaha membawahi 3 (tiga) seksi antara lain :

a. Seksi Regulasi dan Perizinan

Merupakan unsur Pelaksana Bidang Kelembagaan Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, integarsi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis regulasi dan perizinan.

b. Seksi Permodalan dan Pemasaran

Merupakan unsur Pelaksana Bidang Kelembagaan Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis permodalan dan pemasaran.

c. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Merupakan unsur Pelaksana Bidang Kelembagaan Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis kelembagaan dan sumber daya manusia.

4. Bidang Kawasan dan Infrastruktur

Merupakan unsur Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dibidang kawasan dan infrastruktur. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kawasan dan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan, data dan menyiapkan bahan - bahan rumusan kebijakan dibidang kawasan dan infrastruktur;
- b. Penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang kawasan dan infrastruktur;
- c. Pelaksanaan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi dibidang kawasan dan infrastruktur;
- d. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bidang Kawasan dan Infrastruktur membawahi 3 (tiga) seksi antara lain :

a) Seksi Kawasan dan Infrastruktur

Merupakan unsur Pelaksana Bidang Kawasan dan Infrastruktur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis penataan kawasan perikanan laut.

b) Seksi Penataan Kawasan Perikanan Darat

Merupakan unsur Pelaksana Bidang Kawasan dan Infrastruktur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis penataan kawasan perikanan darat.

c) Seksi Infrastruktur Kelautan dan Perikanan

Merupakan unsur Pelaksana Bidang Kawasan dan Infrastruktur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplif. Adapun ikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis infrastruktur kelautan dan perikanan.

5. Bidang Bina Lingkungan dan Konservasi

Merupakan unsur Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dibidang bina lingkungan dan konservasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Bina Lingkungan dan Konservasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan, data dan menyiapkan bahan-bahan rumusan kebijakan dibidang bina lingkungan dan konservasi;
- b) Penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang bina lingkungan dan konservasi;
- c) Pelaksanaan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi dibidang bina lingkungan dan konservasi;
- d) Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Bina Lingkungan dan Konservasi membawahi 2 (dua) seksi antara lain :

1) Seksi Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Merupakan unsur Pelaksana Bidang Bina Lingkungan dan Konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis konservasi sumber daya kelautan dan perikanan.

2) Seksi Bina Lingkungan dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Merupakan unsur Pelaksana Bidang Bina Lingkungan dan Konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis bina lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan.

6. Bidang Produksi, Pengolahan dan Mutu

Merupakan unsur Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dibidang produksi, pengolahan dan mutu. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Produksi, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan, data dan menyiapkan bahan - bahan rumusan kebijakan dibidang produksi, pengolahan dan mutu;

- b) Penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang produksi, pengolahan dan mutu;
- c) Pelaksanaan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi dibidang produksi, pengolahan dan mutu;
- d) Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Produksi, Pengolahan dan Mutu membawahi 3 (tiga) seksi antara lain :

1) Seksi Perikanan Tangkap

Merupakan unsur Pelaksana Bidang Produksi, Pengolahan dan Mutu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis perikanan tangkap.

2) Seksi Perikanan Budidaya

Merupakan unsur Pelaksana Bidang Produksi, Pengolahan dan Mutu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis perikanan budidaya.

3) Seksi Pengolahan, Pengujian dan Pengendalian Mutu

Merupakan unsur Pelaksana Bidang Produksi, Pengolahan dan Mutu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis pengolahan, pengujian dan pengendalian mutu.

7) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.



Gambar 4.4 Struktur Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bima